

Lembaga Pendidikan dan Konsep Luhur Pendidikan

Kurniawati Gautama
niagautama2406@gmail.com
Pekerja Seni Independen

Abstrak

Artikel ini membahas kinerja lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi swasta yang masih mengutamakan sistem akreditasi sebagai sarana untuk menarik minat peserta didik; peran, fungsi, dan efektifitas badan akreditasi nasional dalam memantau perguruan tinggi; serta mentalitas para pelaku pendidikan dalam perguruan tinggi yang akan mempengaruhi kualitas keilmuan kepada peserta didik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya, yang dinilai dari kualitas sistem pendidikan, kemudahan memperoleh pendidikan, dan tersedianya lembaga pendidikan yang berkualitas. Kualitas lembaga pendidikan yang dimaksud bukanlah sekedar dilihat dari status akreditasinya semata, namun dilihat dari tersedianya para pendidik profesional yang berkontribusi pada bidang keilmuan untuk negara bahkan dunia. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Hasil kajian menunjukkan Pendidikan di Indonesia, yang semakin berkembang diikuti dengan pendirian perguruan tinggi swasta harus diimbangi dengan kualitas para pendidik yang mumpuni.

Kata kunci: *Lembaga Pendidikan, akreditasi, revolusi mental, merdeka belajar.*

Abstract

This article discusses the performance of educational institutions, especially private universities which still prioritize the accreditation system as a means to attract students' interest; the role, function, and effectiveness of the national accreditation body in monitoring higher education institutions; as well as the mentality of education actors in higher education which will affect the quality of science to students. One indicator of a nation's progress can be seen from the development of its education, which is judged by the quality of the education system, the ease of obtaining education, and the availability of quality educational institutions. The quality of the educational institution in question is not only seen from its accreditation status, but is seen from the availability of professional educators who contribute to the scientific field for the country and even the world. The research method used is a qualitative method with an observation approach. The results of the study show that education in Indonesia, which is growing, followed by the establishment of private universities, must be balanced with the quality of qualified educators.

Keywords: *Educational Institutions, accreditation, mental revolution, independent learning.*

Pendahuluan

Negara Indonesia telah merdeka sejak 1945, yaitu saat Presiden Pertama RI - Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Pertama RI - Mohammad Hatta, memproklamkan kemerdekaan mutlak Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dari 1602 sampai 1942 dan Jepang dari 1942 sampai 1945. Sebelum masa kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berjuang keras untuk mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang merdeka juga sadar akan hak-haknya untuk mendapat pendidikan yang layak demi kecerdasan dan kemajuan bangsa.

Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Kemajuan suatu bangsa pun ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan pendidikannya.

Sejarah pendidikan telah dimulai dari masa sebelum manusia mengenal tulisan. Pendidikan dalam pengertian paling sederhana merupakan proses pengenalan budaya, yang didalamnya juga meliputi sistem pengetahuan, bahasa, religi, mata pencaharian dan lain sebagainya. Tujuan utama pendidikan pada masa sebelum mengenal literasi masih sangat sederhana yaitu mempersiapkan anak untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan tantangan dari alam (Syaharuddin & Susanto, 12). Seiring berkembangnya pengetahuan dan pengaruh budaya luar, maka pendidikan yang dilakukan juga semakin kompleks.

Pendidikan di Indonesia sebelum masa pergerakan nasional, semula hanya untuk kalangan agamawan dan bangsawan. Lalu para cendekiawan Indonesia yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di zaman kolonial, memperjuangkan agar pendidikan bisa merata untuk semua kalangan. Namun kenyataannya, sampai sekarang pun pendidikan belum benar-benar merata di seluruh wilayah Nusantara, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang berbeda antara desa dan kota. Di desa sarana dan prasarannya sangat minim dibandingkan dengan di kota, serta desa masih kekurangan tenaga pengajar (koranbogor.com, 19 Desember 2019). Selain itu kemiskinan juga menjadi salah satu faktor, di mana hanya yang berekonomi baik yang bisa menikmati sekolah, bahkan kaum elit bisa menikmati fasilitas mewah dari lembaga pendidikan yang mahal. Sudah menjadi *stereotype*, bahwa semakin mahal biaya pendidikan suatu lembaga pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan.

Lalu, apakah masyarakat yang telah membayar mahal lembaga pendidikan, telah sungguh-sungguh mendapatkan kualitas pengajaran yang layak (bukan sekedar fasilitas mewah) dari lembaga pendidikan tersebut dan telah menyediakan para tenaga pendidik – guru atau dosen -

yang mumpuni dan sadar akan tugasnya yang mulia sebagai pendidik? Kenyataan di lapangan, banyak lembaga pendidikan hanya mengejar target akreditasi, agar lembaga pendidikan tersebut, menjadi incaran para peserta didik, yang tidak diimbangi dengan kualitas penuliran ilmu, dan tenaga pendidik yang sekedar mencari nafkah dan bermental ‘asal bapak senang’.

Hal ini pernah dialami penulis sendiri, yang sempat menjadi dosen di salah satu universitas swasta terkemuka di Propinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Selatan kota Bandung, di bawah naungan korporasi perusahaan swasta, yang usia pendiriannya terbilang masih muda (didirikan tahun 2013), namun telah sangat gencar mempromosikan universitasnya sebagai universitas swasta terbaik se-Indonesia.

Semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia, diiringi dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan didirikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, terutama lembaga pendidikan swasta. Bertumbuhnya lembaga pendidikan merupakan hal yang positif karena bisa menampung peserta didik yang jumlahnya juga semakin banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari masa ke masa. Namun tentunya pertumbuhan lembaga pendidikan tersebut, perlu dijaga kualitasnya, sehingga pemerintah membentuk badan akreditasi yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam mengawasi lembaga pendidikan agar tidak merugikan masyarakat.

Tujuan penulisan artikel ini, adalah untuk mendeskripsikan kondisi nyata tentang lembaga pendidikan di Indonesia terutama perguruan tinggi swasta, peran pemerintah dalam mengawasi kinerja perguruan tinggi yang sekaligus memfasilitasi perguruan tinggi agar mampu mengevaluasi kinerjanya, serta perlunya revolusi mental terhadap sumber daya manusia dalam hal ini para pelaku di dunia pendidikan terutama pendidik di perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dalam bentuk observasi langsung, di mana penulis berperan sebagai subjek yang meneliti sekaligus sebagai objek yang mengalami di tempat kejadian, didukung dengan hasil diskusi penulis dengan beberapa rekan pendidik baik dari tempat penulis pernah mengajar maupun dari universitas lainnya. Juga didukung dengan studi pustaka yang diambil dari buku, jurnal, dan telusur esai daring, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pemaparan masalah pada artikel ini, bersifat deskriptif dalam bentuk esai, analisa, serta opini yang mengandung kritik sebagai evaluasi dan perenungan terhadap lembaga pendidikan di Indonesia juga terhadap profesi mulia sebagai pendidik, dengan harapan agar lembaga pendidikan dan pendidik di Indonesia bisa kembali kepada fitrah murni tujuan pengamalan pengajaran dan pendidikan, yang sesuai dengan cita-cita Pendidikan Nasional Indonesia.

Landasan teoritis sebagai pendukung pembahasan masalah diawali dengan pengertian pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan dunia, pendekatan historis tentang pendidikan khususnya pendidikan nasional, dan undang-undang pendidikan nasional, serta diulas tentang etika pendidikan yang perlu diterapkan di lembaga pendidikan.

Pembahasan

Saat mendengar kata pendidikan, pemikiran umum adalah tentang sekolah dan perguruan tinggi. Keduanya dibayangkan memiliki gedung dengan beberapa ruang kelas, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang pengajaran. Padahal pendidikan merupakan proses belajar terus menerus demi keberlangsungan hidup, dan belajar tidak hanya diperoleh dari lembaga pendidikan resmi saja seperti sekolah atau perguruan tinggi, namun bisa diperoleh dari luar sekolah. Ciri umum pendidikan merupakan proses mempertahankan keberlangsungan hidup seseorang atau sekelompok orang dengan cara saling menularkan pengetahuan, terutama dari yang sudah berpengalaman ke yang belum berpengalaman. Seperti yang diutarakan oleh John Dewey (1859 – 1952), seorang kritikus sosial dan pemikir pendidikan asal Amerika:

“Education, in its broadest sense, is the means of this social continuity of life. (Dewey, 1). [...] Education was shown to be a process of renewal of the meanings of experience through a process of transmission, partly incidental to the ordinary companionship or intercourse of adults and youth, partly deliberately instituted to effect social continuity.” (ibid., 346)

Dalam hal ini pendidikan tidak diperoleh dari lembaga pendidikan formal saja seperti sekolah atau perguruan tinggi, namun bisa diperoleh dari luar sekolah. Bahkan bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari, bisa lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta ajar. Seperti diungkapkan oleh Ivan Dominic Illich (1926 – 2002), seorang filsuf Austria dan pengkritik sosial, dalam bukunya *Deschooling Society*:

"[...]... most people acquire most of their knowledge outside school. [...] Most learning happens casually, and even most intentional learning is not the result of programmed instruction." (Illich, 12).

"[...]...umumnya orang mendapat lebih banyak pengetahuan dari luar sekolah. [...] Sebagian besar pembelajaran terjadi secara sambil lalu, dan bahkan pembelajaran yang sesungguhnya bukan hasil dari pengajaran yang telah dirancang." (Illich,12)

Kata sekolah sebenarnya berasal dari Bahasa Latin: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang yang digunakan untuk belajar (Topatimasang, 6). Namun seiring perkembangan zaman, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Arti pendidikan menurut KBBI adalah: (kbbi.web.id)

Pendidikan/pen·di·dik·an/ n : proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Sementara itu pendidikan dalam pengertian UU No.20 Tahun 2003 disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (Peta Jalan Pendidikan Indonesia - PJPI,4). Tujuan pendidikan menurut undang-undang tersebut berarti untuk mencerdaskan peserta didik secara intelektual dan mengembangkan kepribadian mereka secara utuh.

Pendidikan menurut pandangan Maria Tecla Artemisia Montessori (1870 – 1952) - tokoh pendidikan dunia berkebangsaan Italia - adalah pendidikan yang memerdekakan dan membebaskan peserta didik, baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat yang terpendam dalam dirinya. Montessori menerapkan filsafat progressivisme, yang menolak pendidikan otoriter, sebab pendidikan otoriter akan mematikan peserta didik sehingga menjadi pribadi yang tidak gembira saat belajar, sekaligus mematikan daya kreasi baik secara fisik maupun psikis (Maemunah, 68).

Penganut aliran progressivisme lainnya yaitu Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) - pelopor pendidikan modern asal Swiss - bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya (sabyan.org, 14 Oktober 2020). Pistolezzi juga menentang penerapan sistem belajar model hafalan dan disiplin yang keras dan lebih mengarahkan pada sistem ajar berdasarkan kasih sayang dan pemahaman terhadap dunia anak-anak.

“He opposed the prevailing system of memorization learning and strict discipline and sought to replace it with a system based on love and an understanding of the child's world.” (faculty.knox.edu)

“Ia menentang penerapan sistem pembelajaran menghafal dan disiplin yang keras dan mengarahkan untuk menggantinya dengan sistem yang berdasarkan cinta dan pemahaman terhadap dunia anak-anak.” (faculty.knox.edu)

Prinsip pendidikan menurut Montesori dan Pistolezzi ini, yang kemudian menjadi rujukan Ki Hajar Dewantara, dalam menerapkan sistem pendidikan nasional yang ia awali dengan mendirikan Taman Siswa.

Pendidikan di Indonesia yang diulas dalam tulisan ini adalah pendidikan yang mulai memasuki zaman modern Hindia - Belanda (akhir abad ke -18), dan masa awal periode Kebangkitan Nasional (awal abad ke-20) serta mulainya revolusi industri dunia (1750 – 1850). Sejak maskapai perdagangan Belanda - *Vereenigde Oost Indische Caompagnie (VOC)* dibubarkan pada December 1799, Belanda mengakhiri politik tanam paksa menjadi politik etis, sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengecam praktik tanam paksa yang menyebabkan kesengsaraan luar biasa di Hindia Belanda (PJPI, 20).

Sejalan dengan meluasnya revolusi industri, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan industrialisasi sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik. Sejak saat itu dimulailah sistem pendidikan yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang bisa digaji murah. Orientasi pendidikan saat itu akhirnya hanya sekedar mendapatkan status pegawai pemerintah (*ambtenaar*) (ibid., 4).

Tujuan dijabarkan secara singkat tentang sejarah pendidikan di Indonesia ini, adalah dalam kaitannya dengan perkembangan pendidikan di Indonesia serta mentalitas sumber daya manusia Indonesia, dalam hal ini sebagai pendidik, yang selanjutnya berkaitan dengan

maraknya komersialisasi dan kapitalisasi lembaga pendidikan serta penyelewengan terhadap nilai-nilai luhur Pendidikan Nasional Indonesia.

a. Masa Kolonial Belanda (1602 – 1942)

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan hanya diperuntukan bagi orang Belanda dan Pribumi dari kalangan bangsawan atau ningrat, dan tidak memberi hak pendidikan kepada Pribumi dari kaum biasa. Tujuan pendiriannya adalah selain memberi kesempatan pendidikan bagi anak-anak Belanda yang orangtuanya bekerja di Hindia-Belanda, juga bertujuan politis untuk mencerdaskan sebagian elit Pribumi yang diharapkan kelak bekerja untuk pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda sengaja membatasi penduduk Pribumi untuk mendapat pendidikan agar tidak membahayakan posisi mereka. Pembatasan hak pendidikan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu selain biaya pendidikan yang tinggi sehingga hanya kaum elit yang bisa bersekolah, juga dengan sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis, yaitu belajar bukan untuk perkembangan hidup dan kejiwaannya, namun untuk mendapat nilai-nilai yang tinggi atau untuk mendapat ijazah saja (Kumalasari, 50).

Salah seorang Pribumi yang lahir dari keluarga bangsawan, yaitu Raden Mas Surwadi Surjaningrat (1889 – 1959), dan selanjutnya lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara (KHD), memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang layak dari kolonial Belanda. Ia menamatkan ELS (*Europeesche Lagere School*) – Sekolah Rendah (Sekolah Dasar) untuk anak-anak Eropa dan melanjutkan ke STOVIA (*School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen*) – Sekolah Dokter Jawa (Sekolah Dasar Bumiputera), namun tidak tamat karena sakit (Wiryopranoto dalam Maarhandono, 9). Walaupun KHD mendapat pendidikan Belanda dan banyak bergaul dengan kaum elit Belanda, namun jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Ia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan sistem pendidikan Belanda yang sangat elitis dan eksklusif bahkan bertujuan politik yaitu untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Tujuan politik Belanda melalui pendidikan yaitu agar mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah agar patuh pada penjajah, tidak mengabdikan pada bangsanya sendiri dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya (PJPI, 48).

Oleh karena itu KHD, pada 3 Juli 1922 mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta, suatu sarana pendidikan berbasis budaya lokal terutama Jawa, Taman berarti tempat bermain dan belajar, Siswa berarti murid (Kumalasari, 49). Pendirian

Taman Siswa bertujuan untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia agar dapat menikmati pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip pendidikan Taman Siswa salah satunya adalah pendidikan yang membebaskan, tanpa paksaan yang membawa anak agar memiliki jiwa merdeka (ibid., 53). Prinsip lainnya adalah bahwa pendidikan merupakan media kultural dalam rangka membentuk manusia menjadi lebih manusiawi. Oleh karena itu, idealnya tidak boleh ada model “kapitalisasi pendidikan” atau “politisasi pendidikan”, karena pendidikan secara murni, berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan (ibid., 57).

Prinsip kepemimpinan yang diajarkan Taman Siswa, adalah “Konsep Trilogi Kepemimpinan, yang terdiri dari *ing ngarsa sung tuladda* (di depan menjadi teladan), *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun semangat), serta *tut wuri handayani* (mengikuti dari belakang) (ibid. 56). Dari ketiganya, yang diterapkan pada sistem pendidikan adalah *Tut Wuri Handayani*, atau dikenal juga sebagai sistem *Among* (Jawa: pamamong/ngemong, pelindung, pembimbing) yang berarti orientasi pendidikan adalah pada anak (*student centered*) (ibid., 55).

b. Masa Kolonial Jepang (1942 – 1945)

Pada masa kependudukan Jepang, kedatangan Jepang yang awalnya berjanji untuk membantu Indonesia lepas dari penjajahan Belanda, nyatanya hanya rekayasa politik. Jepang lebih tertarik untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan memenangkan perang. Jepang mengeksploitasi Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa kolonial Jepang adalah untuk mendidik anak-anak Indonesia menjadi buruh dan menjadi tentara militer untuk membantu Jepang berperang melawan sekutu (PJPI,52).

Apabila pada masa kolonial Belanda, pendidikan dibatasi hanya untuk orang Belanda dan elit Pribumi, maka pada masa kolonial Jepang, pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Konsep ini kemudian dikenal sebagai bagian dari propaganda Jepang (ibid, 53).

Dari uraian sejarah kolonial, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pada masa kolonial, baik pada masa kolonial Belanda maupun masa kolonial Jepang, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan para penjajah. Walaupun dengan dalih membantu mencerdaskan bangsa Indonesia dengan memberi kesempatan pendidikan bagi

sebagian maupun seluruh bangsa Indonesia, namun tujuan utamanya adalah agar bangsa Indonesia mengabdikan pada penjajah.

b. Masa Kepemimpinan Soekarno (1945– 1965)

Bangsa Indonesia, diwakili oleh Soekarno (Presiden Pertama RI) dan Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama RI), memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, yaitu 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Pancasila sebagai Dasar Negara RI sekaligus Undang-Undang Dasar 45. Segera setelah kemerdekaan, para pemimpin Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (PJPI, 78). Namun kondisi negara Indonesia pasca kemerdekaan, masih belum stabil, karena masih banyak permasalahan yang belum teratasi dan Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia (kompas.com, 26 Mei 2020).

Pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Tujuan pendidikan pada masa itu adalah berlandaskan pada Pancasila, dan penekanannya pada penanaman semangat patriotisme, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI dengan semangat “*nation and character building*” yang dicituskan Soekarno (PJPI, 76).

Pada masa awal pasca kemerdekaan, yaitu masa transisi 1945-1950, sistem di Indonesia masih terpengaruh budaya kolonial, yaitu bersifat satu arah dan kaku, menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. karena guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid (ibid).

Memasuki masa revolusi (1950 – 1966), Pendidikan Nasional membenahi diri dimana pelaksanaan pendidikan diupayakan sesuai dengan UUD 45. Secara umum pendidikan pada masa pemerintahan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Soekarno menerapkan paham sosialisme sebagai rujukan dalam pelaksanaan pendidikan nasional, yaitu pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial (ibid., 91). Pada masa ini, banyak didirikan sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, terutama di Pulau Jawa.

Ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik, sehingga banyak lahir para cendekiawan (ibid.)

c. Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Masa Orde Baru (orba) adalah masa rezim otoriter Suharto yang berhasil menggulingkan Soekarno. Selain ekonomi, sektor pendidikan merupakan aspek yang menjadi fokus utama pemerintahan rezim orba, dengan mengusung tujuan untuk “membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.” Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua landasan utama mencapai tujuan pendidikan nasional pada masa orba, yaitu untuk mempersiapkan manusia yang berjiwa Pancasila (ibid., 109). Namun pada kenyataannya, pendidikan nasional di era orba tidak sepenuhnya dijalankan dengan tujuan murni untuk mencerdaskan bangsa (ibid.,115).

Pada masa pemerintahan Soekarno, setiap peserta didik diajarkan untuk berani bersikap kritis terhadap negara, sebaliknya pada masa orba pengajaran sikap kritis kepada peserta didik dikhawatirkan bisa memunculkan kesulitan tersendiri bagi kalangan penguasa. Pendidikan pada rezim orba bersifat otoriter, yaitu menekankan bahwa setiap siswa dan warga negara pada umumnya harus taat dan patuh terhadap negara tanpa dikenalkan dengan hak-haknya (ibid., 116), sehingga melahirkan generasi yang penurut dan penakut. Selain itu, pendidikan pada rezim orba lebih mementingkan target daripada memperhatikan proses dan kualitas pengajaran (ibid., 123), yang terpenting adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan (attoriolong.com, 14 Maret 2019).

d. Masa Reformasi (1998 –)

Masa Reformasi dimulai saat lengsernya pemerintahan otoriter Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun (1966 – 1998). Pada awal reformasi, tentu saja Indonesia masih dalam proses transisi dari pemerintahan orba, sehingga masih banyak berbenah diri untuk memperbaiki sistem pemerintahan orba. Sistem pemerintahan pada awal reformasi masih belum stabil, sehingga beberapa kali berganti presiden, dengan masa pemerintahan yang singkat diantaranya B.J. Habibie memimpin dari 1998 sampai 1999 dan Abdurrahman Wahid memimpin dari 1999 sampai 2001. Setelah Abdurrahman Wahid, Megawati kemudian memimpin selama satu periode yaitu 2001 sampai 2004, dan menjadi presiden perempuan pertama Indonesia. Megawati digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang memimpin selama dua periode (2004 – 2014).

Setelah Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) didampingi wakilnya H. Jusuf Kalla (2014-2019). Program pendidikan pada pemerintahan pasangan Jokowi - Kalla saat itu, adalah pemberian subsidi penuh bagi anak-anak hingga tingkat SMA, alokasi dana untuk beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi, dan penghapusan sistem Ujian Nasional. (Suryani dalam asumsi.co, 12 Maret 2019)

Selanjutnya Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden RI berpasangan dengan Ma'ruf Amin (2019 – sekarang). Pada masa ini Jokowi – Amin, melakukan reformasi pendidikan dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan merangsang semangat inovasi dan kreasi terurama untuk tingkat pendidikan tinggi. Nadiem Anwar Makariem yang dipercaya sebagai Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Esensi Merdeka Belajar adalah menghargai keberagaman cara belajar serta menggali potensi terbesar para pendidik dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, yang tidak bergantung pada birokrasi pendidikan (kemdikbud.go.id, 6 Mei 2020).

Berdasarkan uraian sejarah, konsep Merdeka Belajar yang diterapkan Nadiem Makariem, nampaknya mendekati konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang membebaskan dan tanpa paksaan, yang mengarahkan peserta didik memiliki jiwa merdeka agar menjadi generasi-generasi berkualitas, berpikiran kritis dan mandiri. Namun apakah konsep ini sudah benar-benar diterapkan oleh para pendidik di lembaga pendidikan Indonesia? Melihat masih banyaknya lembaga pendidikan yang *profit oriented* dan *target oriented*.

Jenjang pendidikan formal di Indonesia dimulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Dasar (kelas 1 - 6), Sekolah Menengah Pertama (kelas 7 - 9), Sekolah Menengah Atas (kelas 10 - 12), dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tinggi sendiri terdiri dari: (Harususilo dalam edukasi.kompas.com, 2019)

- Politeknik

Politeknik ialah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi (keahlian atau ilmu terapan) sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Tujuan pendidikannya adalah menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia pekerjaan.

- Akademi

Akademi hampir sama dengan politeknik yaitu pendidikan tinggi berbasis vokasi. Bedanya dengan politeknik, adalah jika politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berasal dari beberapa rumpun ilmu, sedangkan akademi hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu.

- Universitas

Universitas menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.

- Institut

Institut hampir sama dengan universitas, yang menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Perbedaannya terletak pada fakultasnya, yang berasal dari satu keilmuan saja, misalnya ilmu seni saja seperti Institut Kesenian Jakarta atau ilmu alam saja seperti Institut Pertanian Bogor.

- Sekolah Tinggi

Sekolah tinggi hampir sama dengan universitas dan institut. Perbedaannya ialah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas, dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Misalnya Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI), yang hanya menyediakan jurusan yang berkaitan dengan fakultas desain.

Pendidikan Nasional semakin berkembang dari masa ke masa, dan jumlah lembaga pendidikan terutama institusi swasta menjadi semakin banyak. Menurut data Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) sampai dengan 31 Maret 2017 tercatat 4493 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri atas 1102 Akademi, 254 Politeknik, 2426 Sekolah Tinggi, 154 Institut, dan 557 Universitas termasuk didalamnya adalah Universitas Terbuka. (Buku 1 Naskah Akademik - BINA, 1)

Dalam rangka menjaga mutu dari setiap lembaga pendidikan juga sebagai referensi kepada para calon peserta didik dalam memilih lembaga pendidikan, maka diperlukan suatu standar

yang menjadi indikator jaminan mutu yaitu akreditasi, lembaga yang berwenang untuk membuat penilaian adalah badan akreditasi. Tulisan ini membahasnya pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Manfaat akreditasi bagi institusi yaitu akreditasi membantu untuk mengetahui sejauh mana institusinya telah memenuhi kualitas Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga institusi bisa melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu institusinya. Sementara itu bagi masyarakat, sebagai pengguna jasa institusi dalam hal ini orang tua bagi para calon peserta didik yang masih dalam tanggungan orang tua dan mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, akreditasi diperlukan sebagai referensi untuk menentukan institusi mana yang akan dipilih untuk menimba ilmu (Habiburrahman dalam banpaudpnf.kemdikbud.go.id, 25 Juli 2018)

Akreditasi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan (BINA, 7)

Sebelum adanya BAN-PT, akreditasi hanya dilakukan terhadap PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang tujuannya sebagai suatu pengakuan pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (sevima.com, 1 Agustus 2020). Baru pada 1994 pemerintah membentuk BAN-PT untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi baik PTS maupun PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Dengan adanya BAN-PT maka fungsi akreditasi menjadi salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi (dalam hal ini universitas) yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi telah layak untuk melakukan kegiatan tertentu (*ibid*). Berdasarkan tujuan dan fungsi BAN-PT, maka salah satu manfaatnya bagi universitas adalah agar universitas termotivasi untuk senantiasa meningkatkan mutu universitasnya (BINA, 12). Meningkatkan mutu universitas berarti salah satunya adalah senantiasa memperbaiki kualitas mengajar dosen yang sesuai kompetensi dan pengetahuan dari bidang yang diampu dosen. Pada praktek lapangan sesuai yang dialami penulis saat menjadi dosen dan bersama rekan dosen lainnya di perguruan tinggi tempat kami mengajar, kenyataannya dosen (umumnya dosen tidak tetap atau dosen paruh waktu) sering diminta mengajar untuk mata kuliah yang tidak sesuai kompetensi

dan pengetahuannya, untuk mengisi kelas yang tersedia namun belum ada pengajarnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jumlah pengajar dan jumlah peserta didik yang tidak seimbang, akibat dari keserakahan program studi (prodi) untuk mendapatkan peserta didik sebanyak-banyaknya (*profit oriented*). Apabila terjadi demikian, tentunya ilmu yang disampaikan dosen dan yang diserap peserta didik menjadi tidak tepat.

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS), dilakukan dengan instrumen akreditasi yang salah satunya mencakup kriteria penilaian akreditasi. Dalam hal akreditasi prodi, ada tujuh standar penilaian diantaranya: 1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi; 2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama; 3. Mahasiswa; 4. Sumber Daya Manusia; 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 6. Tridarma Perguruan Tinggi; 7. Luaran dan Capaian Tridarma (Tim Instrumen Akreditasi, 35). Dari tujuh kriteria tersebut, dua diantaranya bisa terukur secara angka, yaitu Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia (dalam hal ini tenaga pengajar). Standar penilaian yang dimaksud adalah rasio jumlah dosen tetap dan tidak tetap, rasio tersedianya dosen dengan jumlah ideal mahasiswa serta kuantitas lulusan dengan indeks prestasi (IP) sangat memuaskan. Ini semua berdasarkan data kuantitas (nilai, nominal, angka) yang rentan untuk dimanipulasi, disembunyikan, bahkan dihilangkan datanya. Hal lainnya, standar penilaian berupa lama masa studi mahasiswa dan persentase kelulusan tepat waktu, memungkinkan prodi mengupayakan percepatan kelulusan mahasiswa dengan mengontrol nilai (sengaja menaikkan nilai), mahasiswa dipaksa untuk mengambil kredit mata kuliah di luar batas kemampuannya, serta proses sidang akhir mahasiswa diperlakukan sebagai formalitas saja. Semua upaya ini bisa saja dilakukan oleh prodi dalam rangka mencapai target akreditasi unggulan, yang tentunya menjadi harapan fakultas agar universitasnya juga mencapai target akreditasi unggul.

Tersedianya BAN-PT tentunya merupakan kepedulian yang sangat positif dari pemerintah. Namun apakah sistem penilaiannya sudah tepat dan cukup efektif, karena kenyataan dilapangan, masih banyak lembaga pendidikan yang berlomba-lomba mengupayakan dengan berbagai cara agar institusinya mencapai target akreditasi unggul.

Kenyataan yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa universitas sebagai lembaga pendidikan, tidak peduli dengan kualitas pengajaran dan hanya mengupayakan agar universitasnya mendapat predikat terbaik. Jadi walaupun sulit untuk benar-benar mendeteksi kecurangan, karena BAN-PT telah mengupayakan sistem penilaian yang terbaik dan senantiasa melakukan perbaikan sistem penilaian akreditasi, maka hasil keputusan BAN-PT tentang

unggul atau tidak unggulnya suatu universitas dan prodi, belum efektif sebagai patokan bahwa suatu universitas dan prodi memang unggul dalam kualitas penularan keilmuan kepada para peserta didik.

Konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menggali potensi terbesar para pendidik dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Dalam hal ini nampak penekanannya adalah pada peningkatan intelektualitas pendidik dan peserta didik. Namun bagaimana dengan kualitas kompetensi dan mental dari para pendidik sebagai pembimbing para peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Apakah peningkatan intelektualitas telah selaras dengan idealisme mental sebagai pendidik?

Saat ini semakin banyak perusahaan atau korporasi yang mendirikan perguruan tinggi dalam rangka program *Customer Service Responsibility* (CSR). CSR adalah wajib bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam (SDA), dan tidak diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang lainnya. Bagi perusahaan atau korporasi yang non-SDA, CSR adalah penting untuk menaikkan citra perusahaan, di mana implementasinya bisa beragam salah satunya melalui pendidikan. Tujuan mulianya adalah sebagai bentuk kewajiban perusahaan atau korporasi dalam rangka turut mencerdaskan bangsa namun tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan generasi baru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, berdirinya perguruan tinggi korporasi ini, akan menampung banyak calon peserta didik, yang umumnya tidak diterima di PTN (Santoso dalam Kompas, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa PTN masih menjadi incaran peserta didik dan seleksi penerimaan peserta didik baru PTN sangat ketat. Apakah ini merupakan salah satu indikasi bahwa PTS korporasi lebih longgar dalam penerimaan mahasiswa dan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas?

Mendirikan suatu perguruan tinggi, tentunya tidak hanya harus siap dengan sarana fisik yang mendukung (gedung, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, dan lainnya), namun juga ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Tenaga pendidik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah guru, dosen, dan professional. (Untuk selanjutnya pembahasan difokuskan pada dosen).

Menurut undang-undang tentang guru dan dosen yang terdapat dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (jdih.kemenkeu.go.id, 2005) yang dimaksud dengan masing-masing dari profesi kependidikan tersebut adalah:

- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dari ketiga profesi tersebut, yang memerlukan bukti kualifikasi akademik (ijazah) formal agar bisa mengajar di suatu lembaga pendidikan, adalah guru dan dosen, dimana guru akan mengajar di sekolah, mulai tingkat SD, SMP, sampai SMA, sementara dosen mengajar di perguruan tinggi. Kualifikasi akademik minimal profesi guru adalah sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4), sementara kualifikasi akademik profesi dosen adalah Magister atau Strata 2 (S2) lalu siap melanjutkan ke jenjang Doktor atau Strata 3 (S3). Selain itu dosen mempunyai kewajiban melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Menjadi seorang pendidik, dalam hal ini dosen, tentunya dituntut kompetensi yang mumpuni dari mata kuliah yang diampu, berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan, keahlian, serta pengalaman. Selain itu seorang pendidikpun harus memiliki mental sebagai pengajar dan menyadari profesinya adalah pekerjaan mulia. Kenyataannya di lapangan, lembaga pendidikan masih menilai tenaga pendidik (dosen) sebatas dari jenjang akademiknya saja yang disahkan dengan ijazah atau sertifikasi. Hal ini menyebabkan banyak dosen masih minim pengalaman lapangan, yang hanya tahu mengajar, dan bukan seorang praktisi. Kenyataan ini juga diutarakan Illich:

“Skill teachers are made scarce by the belief in the value of licenses. Certification constitutes a form of market manipulation and is plausible only to a schooled mind. Most teachers of arts and trades are less skillful, less inventive, and less communicative than the best craftsmen and tradesmen.” (Illich, 13)

“Para pengajar yang ahli telah menjadi langka karena kepercayaan terhadap pentingnya berbagai surat ijin (lisensi). Sertifikasi merupakan suatu bentuk manipulasi pasar dan hanya masuk akal untuk pikiran seorang terpelajar. Banyak para guru seni dan

perdagangan kurang ahli, kurang berdaya cipta, dan kurang komunikatif, dibandingkan para pengrajin dan pedagang.” (Illich,13)

Umumnya yang menjadi dosen adalah yang baru menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya dan belum mendapatkan pekerjaan di dunia nyata, sehingga mengajar sekedar mencari nafkah, bukan niatnya yang murni sebagai pendidik. Mengutip George Bernard Shaw (1856 – 1950), novelis, kritikus, politikus asal Irlandia, dalam buku “Nalar Kritis Pendidikan” (Mu’ammir, 98): *“Those who can not think and do, teach!”* (Seseorang yang tidak bisa berpikir dan berbuat, mengajarliah!). Hal ini merupakan sesuatu yang ironis, seolah menjadi pendidik (dosen) adalah profesi terakhir. Kondisi dosen yang demikian (bukan praktisi), maka penalaran ilmu tidak akan maksimal, dimana peserta didik (mahasiswa), hanya tahu sebatas teori dan praktek dasar saja, tetapi buta penerapan nyata. Selain itu, lembaga pendidikan yang tidak seimbang antara ketersediaan dosen ahli dan jumlah mahasiswa, menyebabkan dosen yang tidak ahli dibidangnya, diminta mengajar sekedar mengisi kekosongan kelas.

Penulis mengambil contoh universitas korporasi yang usianya belum genap 10 tahun (berdiri sejak 2013), dan penulis adalah subjek yang mengalami dan mengobservasi langsung di ‘tempat kejadian’, karena pernah mengajar di prodi seni rupa salah satu fakultas di universitas tersebut. Observasi langsung ini menjadi rujukan untuk tulisan ini.

Penulis mengajar dari tahun 2016 sampai 2019 di prodi tersebut. Dilihat dari latar belakang akademik dosen-dosen tetap yang mengajar di prodi seni rupa universitas tersebut, sudah memenuhi syarat akademik yaitu sebagian besar berlatar belakang pendidikan seni rupa, namun jumlah dosen yang juga berprofesi sebagai praktisi aktif sangat sedikit, lebih banyak dosen yang bukan praktisi. Jumlah mahasiswanya terlalu banyak karena tidak diseleksi ketat dan menerima mahasiswa ‘buangan’ yang tidak diterima di fakultas atau prodi lain. Mahasiswa ‘buangan’ tersebut mengakui bahwa seni rupa bukanlah menjadi pilihan mereka, namun secara otomatis ‘terlempar’ ke prodi yang masih sedikit mahasiswanya. Ini menunjukkan komersialisasi universitas, karena mahasiswa yang tidak lolos seleksi di fakultas lain disalurkan otomatis ke prodi yang masih sedikit mahasiswanya, agar tetap ada dana masuk untuk universitas. Dampaknya adalah sebagian besar mahasiswa menjadi enggan belajar dan menyelesaikan kuliah demi memperoleh ijazah saja. Hal lainnya, dikarenakan indeks prestasi (IP) prodi masih rendah saat itu, maka dilakukan berbagai cara untuk mengangkat IP, salah satunya dengan menekan dosen untuk mengontrol nilai. Dalam upaya mencapai target akreditasi unggul, dimana salah satu indikatornya adalah jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, maka dalam satu semester mahasiswa dipaksakan untuk mengambil kredit diluar kemampuannya serta

dipaksakan agar semua mahasiswa harus lulus bagaimanapun kondisinya, dan sidang akhir mahasiwapun diperlakukan sebagai formalitas saja. Ini berarti berlaku prinsip “wajib lulus” bukan “wajib belajar”, karena setiap mahasiswa memenuhi kriteria atau tidak, wajib diluluskan (Dharmanintyas, 192).

Upaya-upaya yang tidak mencerdaskan peserta didik ini, apabila dibiarkan, maka hanya akan menghasilkan sarjana instan berbasis ijazah saja tanpa mendapatkan kualitas keilmuan yang layak, padahal orangtua mereka sudah membayar mahal dan kelak semakin menurunkan kualitas prodi. Hal ini yang meresahkan penulis dan beberapa dosen lainnya, sampai suatu saat karena ada mahasiswa yang melapor bahwa ia kecewa telah diperlakukan tidak serius oleh kepala program studi (kaprodi) saat sidang akhir, maka penulis memberanikan diri mengkritisi kaprodi dengan mengutarakan pendapatnya bahwa kualitas penuluran keilmuan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar ambisi mencapai akreditasi unggul namun dengan cara mengorbankan mahasiswa, padahal hakekatnya pendidikan adalah untuk mencerdaskan peserta didik (*student centered*), dan tugas pendidik seperti yang telah tercantum dalam undang-undang pendidikan adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Namun sangat disayangkan, sikap kritis penulis tidak bisa diterima kaprodi bahkan dianggap suatu pembangkangan, sehingga penulis diberhentikan dari tugasnya sebagai pengajar. Hal lain yang sangat mengecewakan, pimpinan fakultas tidak bersedia membela dosen yang berintegritas, dengan dalih bahwa dosen adalah dalam otoritas kaprodi. Walaupun kaprodi terbukti merugikan mahasiswa, namun kaprodi bebas dari sanksi, dan ini bukti bahwa fakultas mendukung strateginya dalam memoles status akreditasi prodi agar mencapai target unggul, sehingga akreditasi fakultas dan universitas pun turut terdongkrak. Sesaat setelah penulis diberhentikan, mahasiswa menuntut agar kaprodi diturunkan dari jabatannya. Hal ini bukan semata karena penulis diberhentikan. Mahasiswa memang sudah lama kecewa dengan kinerja kaprodi yang banyak merugikan mahasiswa, namun tidak berani bertindak karena kekuatiran dikeluarkan (*drop out*) dari fakultas. Mahasiswa baru berani bertindak saat sudah terdesak dan menuntut haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun kaprodi berhasil diturunkan oleh mahasiswa, namun penulis tetap dikeluarkan. Ini bukti otoritas universitas yang masih bermental orba, di mana kritik tidak bisa diterima dan dosen dituntut menjadi penurut, dan yang berani mengkritik harus disingkirkan.

Tindakan kaprodi dan pimpinan fakultas seperti yang dijabarkan di atas, merupakan mental dan karakter manusia Indonesia yang lemah yaitu “asal bapak senang” (ABS) – untuk menyenangkan atasan (menyenangkan universitas), dan demi “survive” - cari selamat, sehingga membungkam kritik. Sikap mental ini seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Lubis (1922 – 2004), wartawan senior pendiri kantor berita Antara dan majalah sastra Horizon, dalam bukunya Manusia Indonesia.

Universitas takluk terhadap tuntutan mahasiswa, karena mahasiswa dalam hal ini berperan sebagai pengguna jasa (*customer*), dan tentunya universitas tidak mau kehilangan *customernya*, yang akan berpengaruh pada kinerja universitas. Sangat disayangkan, mahasiswa baru berani bergerak setelah ada dosen yang dikorbankan. Inipun bukti masih ada ketakutan yang tertanam dalam jiwa pemuda, akibat didikan dari sekolah (sebelum menjadi mahasiswa) yang masih menerapkan sistem mengajar satu arah, dan bahwa menurut adalah hal yang baik. Sistem mengajar satu arah ini dikemukakan oleh Paulo Freire (1921 - 199), tokoh pendidikan asal Brazil, dalam bukunya “*Pedagogy of the Oppressed*” sebagai sistem mengajar model ‘bank’ yang mematikan kreatifitas dan keberanian untuk berpikir kritis, yaitu guru berperan sebagai ‘narator’ yang menumpahkan pengetahuannya kepada murid, dan murid hanya menjadi ‘wadah’ pasif yang menampung apa saja yang dikatakan guru:

“Instead of communicating, the teacher issues communiqués and makes deposits which the students patiently receive, memorize, and repeat. This is the “banking” concept of education, in which the scope of action allowed to the students extends only as far as receiving, filing, and storing the deposits.” (Freire, 72)

“Bukannya berkomunikasi, guru berbicara sendiri dan menjadikan seumpama wadah simpan, dimana pelajar dengan sabar menerima, menghafal, dan mengulang. Ini merupakan konsep “bank” dari pendidikan, yang mana cakupan tindakan yang diijinkan kepada pelajar hanya sejauh menerima, mengumpulkan, dan menyimpan ke wadah simpan.” (Freire, 72)

Selain itu sisa-sisa sistem pendidikan rezim orba yang menuntut kepatuhan, masih banyak diterapkan kepada peserta didik, seperti yang dituliskan Afdillah Chudiel (aktivis lembaga kemanusiaan) dalam buku “Sekolah Dibubarkan Saja”:

“Bertanya tabu. Membangkang dosa. Kreatif memalukan. Diam emas. Penurut membanggakan. Itulah sekolah.”

Di sinilah perlunya diterapkan etika pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Mengenai etika pendidikan ini dituliskan oleh Irmayanti Meliono (pengajar Fakultas Ilmu Budaya UI) yang

dimuat dalam buku sekumpulan tulisan “Pedagogik Kritis”. Etika pendidikan adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis terhadap dunia pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar maupun terhadap perilaku para pelaku dalam dunia pendidikan. Refleksi kritis ini akan membawa pada perenungan terhadap berbagai hal apa saja yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Tujuannya adalah agar dalam suatu lembaga pendidikan tersedia para pelaku yang memiliki kesadaran dan kepedulian etis yang sangat tinggi sehingga para pelaku tersebut (pimpinan dan pendidik) tidak terjebak dalam kepentingan ego individual atau kelompok tanpa memperhatikan kepentingan publik (peserta didik). Salah satu elemen hakiki yang ada pada manusia adalah hati nurani. Pada dasarnya semua orang memiliki suara hati, namun tidak semua orang akan mendengarkan suara hatinya apabila ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan banyak orang.

Oleh karena itu, sangat diperlukan revolusi mental bagi para pimpinan perguruan tinggi dan pendidik. Revolusi Mental digagas pertama kali oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (kominfo.go.id, 2 Oktober 2015) Kemudian ide revolusi mental ini, digaungkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2016, dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong (djkn.kemenkeu.go.id, 6 Desember 2020). Relevansinya dengan revolusi mental di jajaran perguruan tinggi adalah, agar terbangun mental para pemimpin dan pendidik yang berintegritas tinggi serta sadar akan profesi mulianya di bidang kependidikan. Dengan demikian, maka akan tercipta suasana pengamalan keilmuan yang demokratis dan sesuai dengan tujuan murni Pendidikan Nasional demi lahirnya generasi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, berpikiran kritis dan bermental ksatria.

Masyarakat pun diharapkan bisa bersikap kritis dan tidak mudah tergiur oleh status akreditasi perguruan tinggi apalagi PT yang terlalu gencar mempromosikan dirinya sebagai PT yang unggul dan terbaik, karena bukan seberapa besar suatu PT mampu menghasilkan nilai, namun lebih pada proses pembelajarannya. Idealnya lembaga pendidikan yang bermutu adalah yang menjadikan anak yang tidak pintar menjadi pintar (Mu’ammam, 166).

Simpulan

Manusia sejak zaman purba sampai zaman peradaban dan masa milenial sekarang ini, tentunya terus berevolusi, berkembang, dan belajar untuk bisa bertahan hidup dan menyesuaikan diri dari segala tantangan perubahan alam dan zaman. Tantangan dan perubahan tersebut, akan terus menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi manusia.

Pendidikan yang pada awalnya bersifat sangat sederhana tanpa mengenal sistem yang kompleks, seiring perkembangan zaman, menjadi tersistem bahkan berjenjang dan dilakukan di dalam ruangan (gedung sekolah). Pendidikan yang masih dipercayai adalah pendidikan formal yang memberikan ijazah, sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal keilmuan bisa diperoleh dari luar sekolah formal (sekolah alternatif) yang tidak menjanjikan ijazah dan gelar, namun memberikan ilmu praktis yang dibutuhkan peserta didik.

Ijazah lantas menjadi semacam kunci masa depan peserta didik, tanpa ijazah berarti tidak punya masa depan. Itulah ironisnya sistem pendidikan formal, yang segala sesuatunya dinilai berdasarkan bukti administratif saja, bahkan kualifikasi seorang peserta didik, ditentukan oleh selembar kertas bernama ijazah.

Kebergantungan pada ijazah ini juga berlaku kepada pendidik – guru dan dosen – bahwa kualifikasi mereka dilihat hanya dari gelar akademik yang tersahkan dalam ijazah yang diperoleh setelah menyelesaikan masa studi. Padahal gelar akademik seseorang tidak menjamin kualitas intelektualitas dan kreatifitas orang tersebut. Para praktisi profesional yang tidak (melulu) mengandalkan ijazah, dan memiliki *passion* serta idealisme untuk pekerjaannya, yang lebih banyak belajar dari praktek di lapangan dan terus mengasah keilmuannya salah satunya dengan banyak membaca, biasanya lebih berwawasan luas dan kreatif. Sementara dosen formal, banyak yang bekerja bukan karena *passion*-nya namun sekedar mencari nafkah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang bermental ‘asal bapak senang’ dan ‘demi *survive*’ dan tidak berani bersikap kritis (cari aman saja).

Walaupun demikian, idealisme dan integritas seseorang dengan segala resikonya, tetap memberi kontribusi yang positif baik bagi dirinya sendiri juga bagi orang banyak. Hal ini bisa dilihat dari para pendidik yang sekaligus praktisi profesional yang dengan idealisme, integritas,

dan kecintaannya terhadap pekerjaannya, bisa membawa mereka berhasil sampai ke mancanegara dan menghasilkan generasi baru yang juga berkualitas.

Pendidikan di Indonesia, yang semakin berkembang, diiringi dengan semakin banyaknya perguruan tinggi swasta dalam naungan perusahaan atau korporasi, dan menawarkan fasilitas yang mewah, belum tentu diimbangi dengan kualitas para pendidik yang mumpuni karena segala sesuatunya masih dinilai dari perspektif kuantitas (jumlah mahasiswa yang sangat banyak, jumlah doktor yang sangat banyak), dan masih berorientasi pada mengejar target akreditasi unggul, sehingga mengesampingkan idealisme nilai-nilai luhur kependidikan.

Badan Akreditasi Nasional, dalam hal ini BAN-PT, yang seharusnya menjadi sarana bagi PT untuk mengevaluasi kinerjanya, malah disalahgunakan maknanya oleh banyak PT, yaitu sebagai ajang persaingan prestise dengan PT lain agar PT-nya mendapat akreditasi unggul, sehingga menjadi incaran publik dan mempermudah dalam pengusulan proyek kerjasama institusi dengan perusahaan bahkan pemerintah (sevima.com, 1 Agustus 2020). Sistem penilaian akreditasi BAN-PT, yang senantiasa diperbaiki untuk menjadi lebih baik, barangkali perlu ditambahkan instrumen untuk mengukur idealisme dan integritas para pemimpin PT dan pendidik, walaupun hal ini sangat sulit dan utopis.

Bangsa Indonesia walaupun sudah merdeka sejak 1945, dan saat ini hidup di masa reformasi yang lebih demokratis, ternyata masih banyak sisa-sisa mental orde baru, dimana kritik menjadi sesuatu yang tabu dan membahayakan bagi yang berani berpikiran dan bertindak kritis demi memperjuangkan kebenaran. Namun, kritik positif tetap diperlukan, karena akan berkontribusi untuk suatu perubahan, sekecil apapun, sekarang ataupun nanti.

Sebagai upaya membentuk pribadi-pribadi tangguh dan berintegritas, maka diperlukan revolusi mental bagi para pelaku pendidikan, dalam hal ini para pimpinan lembaga pendidikan agar bisa mengutamakan kualitas dan bersikap demokratis; dan bagi para pendidik, agar mempunyai motivasi diri bahwa mengajar adalah sesuatu yang membanggakan dan mulia, bukan sekedar untuk mencari nafkah dan senantiasa termotivasi untuk terus mengembangkan diri dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai minat dan profesinya dengan tujuan menambah wawasan bukan sekedar demi mendapatkan sertifikat (kolektor sertifikat) - sebagai pendukung administratif untuk naik jabatan fungsional (jafung). Apabila dari pimpinan dan pendidik telah mempunyai idealisme dalam pendidikan, maka mereka akan mampu mengajar dan membimbing generasi baru menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, kreatif, tangguh, dan ksatria.

Sumber Referensi

- “Apa Manfaat Akreditasi oleh BAN-PT bagi PTN dan PTS?” sevima.com. 1 Agustus 2020, <https://sevima.com/apa-manfaat-akreditasi-oleh-ban-pt-bagi-ptn-dan-pts/> Diunduh 25-6-2021.
- Buku 1 Naskah Akademik. *Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh*. BAN-PT, 2017.
- Chudiel, Afdillah. *Sekolah Dibubarkan Saja!*. Jalan Baru. 2019.
- Dewey, John. *Democracy and Education: an Introduction to the Philosophy of Education*. Foreword by Khrisna Kumar. Aakar Books. Indian Edition, 2004
- Dharmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Intrans Publishing. 2015.
- Ensiklopedia Bebas, Wikipedia. “Pendidikan” <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>. Diunduh 27-6-2021
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Opressed*. 30th anniversary edition. Translated by Myra Bergman Ramos with an Introduction by Donald Macedo. 30th anniversary edition, Continuum, 2005. <https://book4you.org/book/647366/8a0791>. Diunduh 29-6-2021.
- Habiburrahman. “Mengapa Akreditasi Penting.” banpaudpnf.kemdikbud.go.id, 25 Juli 2018, <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengapa-akreditasi-penting>. Diunduh 25-6-2021.
- Harususilo, Yohanes Enggar. "Ini Beda Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi." Kompas.com, 10 Desember 2019, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/10/14564111/ini-beda-universitas-institut-sekolah-tinggi-politeknik-dan-akademi?page=all>. Diunduh 26-6-2021.
- Humas Banten-Kanwil DJKN Banten. “Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Masa Pandemi.” djkn.kemenkeu.go.id, 6-12-2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13549/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental-Di-Masa-Pandemi.html>. Diunduh 27-6-2021.
- Illich, Ivan. *De Schooling Society*. <http://philosophy.la.psu.edu/illich/deschool/>, Diunduh 29-6-2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/didik>. Diunduh 21-6-2021.
- “Kondisi Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan.” kompas.com. 26-5-2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/26/140000569/kondisi-indonesia-pasca-proklamasi-kemerdekaan?page=all>. Diunduh 23-6-2021.
- Kumalasari, Dyah. “Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Religius)”. *Jurnal Istorica*, vol. VIII, no. 1, 2010, hal. 47-59. <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/3716>
- Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2019.
- Maemonah, Ani Oktarina. “Filsafat Pendidikan Maria Montessori dengan Teori Belajar Progresivisme dalam Pendidikan AUD.” *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya*, Vol. VI. No. 2. Juli-Desember 2019, hal. 64-88. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/7277>, Vol 6, No 2 (2020)

- Meliono, Irmayanti. "Etika Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, editor H.A.R. Tilaar, dkk. Irineka Cipta. 2011, hal. 60-62.
- Mu'ammam, M.Arfa. *Nalar Kritis Pendidikan*. IRCiSoD. 2019.
- Pestalozzi, Johann Heinrich. http://faculty.knox.edu/jvander/202_K/Pestalozzi.htm. Diunduh 30-6-2021.
- Pratama, Yusuf. "Pendidikan Di Indonesia Yang Kurang Merata Khususnya Daerah Yang Jauh Dari Kota." koranbogor.com, 19 Desember 2019, <http://koranbogor.com/bogor-now/pendidikan-di-indonesia-yang-kurang-merata-khususnya-daerah-yang-jauh-dari-kota/>. Diunduh 29-6-2019.
- Presiden RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm>. Diunduh 18-6-2021.
- Redaksi Attoriolong. "Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru." attoriolog.com. 14-3-2019. <https://attoriolong.com/2019/03/pendidikan-di-indonesia-pada-masa-orde-baru/>. Diunduh 23-6-2021.
- "Reformasi Pendidikan Nasional Melalui Merdeka Belajar." Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, [kemendikbud.go.id](https://www.kemendikbud.go.id), 06-5-2020, <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/05/reformasi-pendidikan-nasional-melalui-merdeka-belajar>. Diunduh 24-6-2021.
- Sabyan PAUD. "Pandangan Pestolezzi terhadap PAUD". sabyan.org. 14-10-2020. <https://sabyan.org/pandangan-pestolezzi-terhadap-paud/>. Diunduh 30-6-2021.
- Santoso, Budi. "Universitas Korporasi." Kompas, 24-11-2017, hal. 6 – 001, www.uc.ac.id, 22 Januari 2018, <https://www.uc.ac.id/library/universitas-korporasi-kompas-24-november-2017-hal6-001/>. Diunduh 26-6-2021.
- Suryani, Winda Chairunisyah. "Kinerja Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan: Bagaimana Janji dan Capaiannya?" asumsi.com. 12-3-2019 <https://asumsi.co/post/kinerja-pemerintahan-jokowi-di-bidang-pendidikan-bagaimana-janji-dan-capaiannya>. Diunduh 24-6- 2021.
- Sugiyono, dkk. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Tim UNY, 2013. <https://my.b-ok.as/book/5785783/0f525c>
- Syahrudin dan Susanto. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi*. Editor: Bambang Subiyanto. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2019.
- Tim Instrumen Akreditasi. *Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0*. BAN-PT, (.....)
- Tim PKP – Kemenkominfo. "Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar." www.kominfo.go.id, 2-10-2015, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr. Diunduh 27-6-2021.
- Topatimasang, Roem. *Sekolah itu Candu*. Insist press. Cetakan ke – 6. 2020.
- Wiryopranoto, Suhartono, dkk. "Gagasan Ki Hajar Dewantara di Bidang Politik." *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Editor: Djoko Marihandono. Museum Kebangkitan Nasional Kemendikbud, 2017. <https://jp.b-ok.as/book/11050856/ccbc58>. Diunduh 22-6-2021